



REVISI RENSTRA 1 DINAS PERTANIAN TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PERTANIAN

Komplek Perkantoran Cimaja Jl Raya Cisolok Km 10
Telp (0266) 436407-436408 Cisolok Palabuhanratu-Sukabumi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi dapat menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) 1 Tahun 2016 – 2021 dalam rangka menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan.

Revisi Renstra ini disusun sebagai penjabaran dari revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi 2016-2021, dan dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan, serta visi Kabupaten Sukabumi.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Revisi Renstra 1 Dinas Pertanian dapat disusun dan menjadi pedoman serta acuan bagi pelaksanaan Pembangunan Pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016 -2021 .

Sukabumi, Januari 2019
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi,

Ir. H. SUDRAJAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620422 198803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian	7
2.2. Sumber Daya PD Dinas Pertanian	16
2.3. Sarana dan Prasarana	18
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas	19
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi	26
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD Dinas Pertanian	28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	31
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian	35
3.4. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat	39
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1. Visi Pembangunan	44
4.2. Misi	44
4.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	46
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	54
BAB VI INDIKATOR KINERJA PD DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	57
PENUTUP	59

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi	9
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017	17
Tabel 2.3 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Golongan Tahun 2017	18
Tabel 2.4 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017	18
Tabel 2.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Tahun 2011-2015 Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi	20
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015	21
Tabel 2.7 Capaian Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2011 – 2015	22
Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 bagi Dinas Pertanian	47
Tabel 4.2 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 1	48
Tabel 5.1 Program Pembangunan Pertanian Tahun 2016 – 2021	54
Tabel 6.1 Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian secara umum telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian, serta secara ekologi subsektor perkebunan berfungsi untuk meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen dan penyedia kawasan lindung. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tertuang di dalam dokumen perencanaan, diantaranya RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi diselaraskan dengan rencana pembangunan pertanian di Jawa barat dan rencana pembangunan pertanian nasional.

Naskah Renstra SKPD Dinas Pertanian ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja lima tahunan, terhitung sejak tahun 2016 – 2021, sesuai masa bhakti pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sebagai rencana kerja, Renstra SKPD Dinas Pertanian ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi, 2016 – 2021, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masa bhakti 2016 – 2021, maka visi dan misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi,

dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan, terutama penyesuaian dengan kapasitas keuangan daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati pada setiap bidang kewenangan sudah benar-benar sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.

Karena berfungsi sebagai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016– 2021, maka isi dan substansi dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; dan
2. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan dari perujukan terhadap kedua aturan perundangan di atas antara lain adalah:

1. Mendorong Dinas Pertanian untuk menyusun rencana program dan kegiatan atas sebagian dari kewenangan Bupati Sukabumi di bidang Pertanian dasar dan menengah dalam rangka mencegah duplikasi program dengan kewenangan Gubernur di bidang yang sama.
2. Mendorong Dinas Pertanian untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang masuk dalam batas tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi program dengan tugas pokok dan fungsi PD yang lain.

Dasar Penyusunan Revisi Renstra 2 Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 adalah :

1. Adanya Peraturan Bupati tentang perubahan indikator RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021
2. Adanya perubahan SOTK Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi No. 75 Tahun 2018, dikarenakan adanya peralihan kewenangan penyuluh Pertanian Kabupaten Sukabumi dari Dinas Ketahanan Pangan ke Dinas Pertanian.

2.1. Landasan Hukum.

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Pertanian ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan MenPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.
25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
26. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi.
27. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sukabumi

2.2. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Revisi Renstra 1 PD Dinas Pertanian ini antara lain adalah:

2.2.1. Maksud

- a. Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Pertanian dalam menyusun Renja PD sebagai bahan acuan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- b. Pedoman, acuan dan arahan bagi Dinas Pertanian dan seluruh stake holder dalam menentukan kebijakan, strategi pencapaian, program dan kegiatan di bidang pertanian.

2.2.2. Tujuan

- a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
- b. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Dinas Pertanian dengan arahan strategis Visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi.
- c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Dinas Pertanian maupun sebagai

bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP No. 3 tahun 2007.

2.3. Sistematika Penyusunan.

Sistematika penulisan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraPD) Dinas Pertanian 2016 – 2021 terdiri dari 6 (enam) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PD DINAS PERTANIAN

KABUPATEN SUKABUMI

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD Dinas Pertanian
- 2.2 Sumber Daya PD Dinas Pertanian
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian
- 3.4 Telaahan Renstra Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi Pembangunan
- 4.2 Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI INDIKATOR KINERJA PD DINAS PERTANIAN KABUPATEN

- SUKABUMI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
- PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN
KABUPATEN SUKABUMI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Dalam rangka mengejawantahkan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah maka isi bab ini dibatasi hanya untuk menyajikan gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pertanian termasuk Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab I, maksud dan tujuan pembatasan dimaksud adalah untuk mencegah terjadinya duplikasi kewenangan antar tingkat pemerintahan dan duplikasi program antara Dinas Pertanian dengan SKPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terjadi reorganisasi dinas dan dibentuk kembali Dinas Pertanian.

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan di bidang pertanian dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Pertanian adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pertanian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas;

- d. Pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas;
- e. Pembinaan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. Penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;
- g. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian;
- h. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan;
- i. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluh pertanian;
- j. Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;
- k. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Dinas;
- l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Kasubag. Kepegawaian dan Umum
 - b. Kasubag. Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan
 - b. Seksi Produksi Holtikultura
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
4. Kepala Bidang Perkebunan, membawahi :
 - a. Seksi Penatausahaan Perkebunan
 - b. Seksi Produksi Perkebunan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
5. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian
 - c. Seksi Data, Informasi dan Penyuluhan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 2.1. Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Jabatan	Ringkasan Uraian Tugas
Kepala Dinas	a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian; b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, bidang tanaman pangan dan Hortikultura, bidang perkebunan, bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas; d. pelaksanaan administrasi di lingkungan dinas; e. pembinaan pelayanan publik di lingkungan Dinas f. penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian; g. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang Pertanian; h. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan; i. pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian; j. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait; k. Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Dinas; l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas ; dan o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Sekretaris	a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat; b. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi; c. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan; d. pelayanan administratif kepada unit organisasi di lingkungan Dinas; e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang di Lingkungan Dinas; f. pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang kesekretariatan; g. pengkajian dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas; h. pengkajian dan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; i. pengkajian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas; j. pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas; k. pembinaan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas; l. penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

	<ul style="list-style-type: none"> m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Kasubag Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang Umum dan Kepegawaian; b. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang umum dan kepegawaian; d. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang dan perlengkapan; e. pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang, perlengkapan dan kerumahtanggaan; f. penyusunan bahan neraca barang milik daerah di lingkungan Dinas; g. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokol di lingkungan Dinas; h. pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan; i. pengelolaan kepegawaian; j. pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai di lingkungan Dinas; k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi; b. pengumpulan dan pengolahan data keuangan, perencanaan dan evaluasi; c. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan anggaran di lingkungan Dinas; d. pembinaan dan fasilitasi teknis keuangan di lingkungan Dinas; e. penyusunan laporan keuangan Dinas; f. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai di lingkungan Dinas; g. penyusunan rencana dan program kerja Dinas; h. pembinaan dan fasilitasi teknis di bidang perencanaan dan program di lingkungan Dinas; i. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi di bidang keuangan Dinas; j. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas; k. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas; l. penyiapan bahan dan penyusunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas; m. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas; n. penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta

	<p>elayanan publik di lingkungan Dinas;</p> <p>o. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;</p> <p>p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>q. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;</p> <p>r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan</p> <p>s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.</p>
<p>Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura</p>	<p>a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;</p> <p>b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang produksi tanaman pangan, produksi Hortikultura dan pengolahan dan pemasaran;</p> <p>c. pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan Hortikultura;</p> <p>d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>e. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan di bidang produksi tanaman pangan, produksi Hortikultura dan pengolahan dan pemasaran;</p> <p>f. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>g. pengelolaan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>h. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>j. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>k. pengkajian bahan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>l. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;</p> <p>o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan</p> <p>p. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.</p>
<p>Kepala Bidang Perkebunan</p>	<p>a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perkebunan;</p> <p>b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penatausahaan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;</p> <p>c. pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang tanaman perkebunan;</p> <p>d. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;</p> <p>e. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang perkebunan;</p> <p>f. pengelolaan produksi tanaman perkebunan;</p> <p>g. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;</p> <p>h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit,</p>

	<p>penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;</p> <p>i. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;</p> <p>j. pengkajian pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;</p> <p>k. pemantauan dan evaluasi teknis pasca penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;</p> <p>l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>m. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;</p> <p>n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan</p> <p>o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.</p>
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	<p>a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian;</p> <p>b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lahan dan air, Pupuk, pestisida dan alsintan serta data, informasi dan penyuluhan;</p> <p>c. pengkajian bahan kebijakan teknis dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;</p> <p>d. perencanaan kebutuhan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;</p> <p>e. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;</p> <p>f. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan air;</p> <p>g. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;</p> <p>h. Penyusunan bahan kebijakan teknis operasional Penyuluhan</p> <p>i. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;</p> <p>j. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;</p> <p>k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;</p> <p>l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan</p> <p>m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.</p>
Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan	<p>a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Produksi Tanaman Pangan;</p> <p>b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang produksi tanaman pangan;</p> <p>c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang produksi tanaman pangan;</p> <p>d. penyusunan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;</p> <p>e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang produksi serta penerapan teknologi budidaya di bidang produksi tanaman pangan;</p> <p>f. penyusunan bahan kebijakan perbenihan dan perlindungan, penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih dan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul serta rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;</p> <p>g. pelaksanaan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;</p> <p>h. pelaksanaan pengelolaan produksi benih tanaman pangan;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> i. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Kepala Produksi Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Produksi Hortikultura; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang produksi Hortikultura; c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang produksi Hortikultura; d. penyusunan bahan rencana tanam dan produksi di bidang Hortikultura; e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang produksi serta penerapan teknologi budidaya di bidang produksi Hortikultura; f. penyusunan bahan kebijakan perbenihan dan perlindungan, penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih dan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul serta rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang Hortikultura; g. pelaksanaan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih Hortikultura; h. pelaksanaan pengelolaan produksi benih hortikultura; i. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan Hortikultura; c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran tanaman pangan dan Hortikultura; d. penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura; e. penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura, penyusunan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura; f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar; g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi teknis pengolahan dan pemasaran dan promosi produk tanaman pangan dan hortikultura; h. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Penatausahaan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Penatausahaan Perkebunan; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang penatausahaan perkebunan; c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang penatausahaan perkebunan; d. penyusunan bahan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan; e. pelaksanaan pembinaan di bidang penatausahaan perkebunan; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi teknis pasca penerbitan izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan; g. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Kepala Seksi Produksi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Produksi Perkebunan; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang produksi perkebunan; c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan; d. penyusunan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan; e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dan penerapan teknologi budidaya di bidang produksi perkebunan rakyat; f. penyusunan bahan kebijakan perbenihan dan perlindungan, penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih dan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul serta rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan; g. pelaksanaan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih perkebunan; h. pelaksanaan produksi tanaman perkebunan; i. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; j. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; d. penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan; e. penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman perkebunan, penyusunan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang perkebunan;

	<ul style="list-style-type: none"> f. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar; g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi teknis pengolahan dan pemasaran serta promosi produk perkebunan; h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengelolaan lahan dan air; c. penyusunan bahan kajian teknis di bidang pengelolaan lahan dan air; d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pangan berkelanjutan; e. pelaksanaan pembinaan, peningkatan dan pengembangan serta ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pangan berkelanjutan; f. pengawasan dan pengendalian pengelolaan lahan dan air; g. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
Kepala seksi Pupuk, Pestisida, dan Alat Mesin Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; d. penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian; e. pelaksanaan penghitungan kebutuhan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; f. penyusunan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan ; g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; h. pelaksanaan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; i. pelaksanaan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; j. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas

Kepala Seksi Data, Informasi dan Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi Data, Informasi dan Penyuluhan; b. pengumpulan dan pengolahan data di bidang data, informasi dan penyuluhan; c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang data, informasi dan penyuluhan; d. penyusunan bahan kebijakan teknis operasional di bidang data, informasi dan penyuluhan; e. penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan data, informasi dan penyuluhan (Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan); f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya; h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
Kepala UPTD	Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu
Kelompok Jabatan Fungsional	Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya PD Dinas Pertanian

Komposisi Sumber Daya Manusia jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi berdasarkan peraturan Bupati tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon IIb yaitu Kepala Dinas; 1 (satu) orang Eselon IIIa yaitu sekretaris; 3 (tiga) orang eselon IIIb yaitu kepala bidang; 18 (sebelas) orang Eselon IVa yang terdiri dari 2 (dua) orang kasubbag, 9 (sembilan) kepala seksi dan 8 (delapan) orang Kepala UPTD serta; 8 (delapan) orang Eselon IVb yaitu Ka TU UPTD.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Dinas Pertanian penggerak pembangunan pertanian. Komposisi jumlah pegawai Dinas Pertanian dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Berdasarkan statusnya Pegawai Dinas pertanian berjumlah 141 orang yang terdiri dari 88 orang PNS, sedangkan non PNS sebanyak 53 orang. Adapun komposisi pegawai Dinas Pertanian berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 115 orang laki-laki atau 81,56 %

dan perempuan sebanyak 26 orang atau 18,44 %, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2. Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Pertanian berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 8 orang atau 9,09 %, golongan III sebanyak 48 orang atau 54,55 %, golongan II sebanyak 31 orang atau 35,23 %, dan golongan 1 sebanyak 1 orang atau 1,14 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) 11 orang atau 7,8 %, Sarjana 45 orang atau 31,91 %, Diploma 13 orang atau 9,22%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 70 orang atau 49,65 % seperti tertera pada Tabel 2.4.

Tabel 2.2. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	KEPALA DINAS	1	-	1
2.	SEKRETARIAT	13	3	16
3.	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	11	6	17
4.	BIDANG PERKEBUNAN	11	-	11
5.	BIDANG PRASARANA, SARANA PENYULUHAN PERTANIAN	6	5	11
6.	UPTD	28	4	32
7.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			
7.	THL	46	7	53
TOTAL		115	26	141

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pertanian Kab.Sukabumi Tahun 2019

Tabel 2.3. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Golongan Tahun 2017

No.	Golongan	PNS	CPNS	Jumlah	%
1	Golongan IV	8	-	8	9,09
2	Golongan III	48	-	48	54,55
3	Golongan II	31	-	31	35,23
4	Golongan I	1	-	1	1,13
	JUMLAH	88	-	88	100,00

Sumber DataKepegawaian Dinas Pertanian Kab.Sukabumi Tahun 2019

Tabel 2.4. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	KEPALA DINAS	1	-	-	-	-	-	1
2.	SEKRETARIAT	2	1	4	9	-	-	16
3.	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3	6	1	6	1	-	17
4.	BIDANG PERKEBUNAN	1	7	1	2	-	-	11
5.	BIDANG PRASARANA, SARANA PENYULUHAN PERTANIAN	2	6	2	1	-	-	11
6.	UPTD	2	10	-	18	2	-	32
7.	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL							
8.	THL	-	15	6	20	2	10	53
	TOTAL	11	42	8	38	2	5	141

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pertanian Kab Sukabumi Tahun 2019

2.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi adalah kantor seluas 36.850 m², Kendaraan Dinas sebanyak 48 Unit terdiri dari Roda 4 sebanyak 10 unit dan roda 2 sebanyak 81 unit, Laptop sebanyak 10 unit Personal Komputer (PC) sebanyak 13 unit, Saluran Telepon dan Fax sebanyak 3 Line dan ruang rapat yang memadai dapat menampung 100 Orang.

2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat dari gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan SKPD sebagai penjabaran visi, misi Kabupaten Sukabumi dan strategi SKPD yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kinerja Dinas Pertanian bisa diukur indikator kinerjanya. Hal ini merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Tahun 2011 – 2015 Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Capaian Kinerja dan Pendanaan																				
			Target Renstra PD Tahun					Realisasi Renstra PD Tahun					Capaian Renstra PD Tahun										
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
	Ketersediaan pangan pokok																						
	a. Produksi pertanian :																						
	* padi	827.154	836.666	846.288	856.020	865.864	875.822	893.975	928.468	928.803	932.770	886.304	106,85	109,71	108,50	107,73	101,20						
	* jagung	57.543	58.786	60.056	81.353	62.878	64.032	41.432	43.684	45.653	34.992	38.4234	70,48	72,74	75,00	60,00	100,01						
	* Kedelai	2.264	2.313	2.363	2.414	2.466	2.519	4.942	4.112	10.820	18.124	10.922	218,29	174,02	448,22	734,96	433,58						
	* Ubi Kayu	150.423	153.672	156.991	160.382	163.847	167.386	202.061	272.407	195.907	165.520	156.844	131,49	173,52	121,80	101,02	93,70						
	Pengembangan unit-unit komoditas unggulan	205	371	411	451	491	531	648	414	456	493	531	174,66	100,73	101,11	100,41	100,00						
	Produksi Komoditas Pertanian :																						
	Produktivitas padi	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%	3,71%	3,75%	1,01%	1,5%	100,00	322,61	326,08	87,83	87,83						
	Produktivitas palawija	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	3,5%	3,5%	2,2%	2,5%	100,00	159,09	162,04	101,85	101,00						
	Produktivitas hortikultura	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,00%	5,00%	4,50%	5,00%	100,00	90,91	90,91	81,81	81,84						

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 - 2015

Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke- (juta)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (juta)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENDAPATAN DAERAH															
Pendapatan Asli Daerah	78.700.000	82.440.000	82.440.000	98.440.000	88.440.000	79.900.000	99.500.000	76.440.000	93.450.000	34.000.000	101,52	120,69	92,72	94,93	38,44
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.133.821.725	4.815.431.444	4.462.905.686	4.638.977.566	5.318.142.169	4.015.942.649	4.236.496.728	4.396.977.628	4.531.845.709	5.175.566.228	97,15	87,98	98,52	97,69	97,32
BELANJA LANGSUNG	16.386.281.000	22.759.861.933	37.575.663.300	43.891.526.618	51.278.619.031	16.134.320.998	22.407.484.577	36.976.298.942	43.332.670.530	50.674.551.950	98,46	98,45	98,40	98,73	98,82
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan	15.587.827.000	12.680.556.783	16.578.260.075	18.974.999.228	36.705.240.754	15.358.046.090	12.516.596.550	16.204.961.503	18.690.389.000	36.309.737.000	98,52	98,71	97,75	98,50	98,92
- Program peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan		648.999.500	698.135.000	1.979.315.000	555.000.000		644.532.500	690.144.000	1.950.447.397	493.656.600		99,31	98,86	98,54	88,95
- Program peningkatan Produksi Pertanian		7.514.001.200	17.329.922.100	18.561.272.000	12.866.474.277		7.371.656.000	17.140.252.485	18.343.257.750	12.752.689.350		98,11	98,91	98,83	99,12

Tabel 2.7. Capaian Tanam, Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2011 – 2015

NO	URAIAN	REALISASI LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI				
		2011	2012	2013	2014	2015
I	PADI					
	1.1. Padi Sawah					
	Luas Tanam (Ha)	117.048	143.473	127.417	139.009	123.859
	Luas Panen (Ha)	121.716	135.371	131.791	135.935	131.126
	Produktivitas (Kw/Ha)	61,40	63,38	62,58	61,69	61,84
	Produksi (Ton GKG)	747.359	857.999	824.745	838.534	810.940
	1.2. Padi Gogo					
	Luas Tanam (Ha)	17592	24415	23987	20210	24711
	Luas Panen (Ha)	14271	18523	22973	24843	19935
	Produktivitas (Kw/Ha)	37,78	38,04	36,48	37,93	37,82
	Produksi (Ton GKG)	53916	70469	83806	94237	75400
	Jumlah Padi					
	Luas Tanam (Ha)	134640	167888	151404	159219	148570
	Luas Panen (Ha)	135987	153894	154764	160778	151061
	Produktivitas (Kw/Ha)	58,92	60,33	58,71	58,02	58,67
	Produksi (Ton GKG)	801275	928468	908551	932771	886340
II	PALAWIJA					
	2.1. Jagung					
	Luas Tanam (Ha)	14702	9788	8782	9278	12918
	Luas Panen Tua (Ha)	7614	7112	7433	5679	6168
	Produktivitas (Kw/Ha)	52,53	61,42	61,42	61,62	62,29
	Produksi (Ton Pipilan Kering)	39995	43684	45653	34993	38424
	2.2. Kedelai					
	Luas Tanam (Ha)	3925	5460	7072	14828	4746
	Luas Panen (Ha)	3032	2356	7386	11124	6721
	Produktivitas (Kw/Ha)	14,29	14,76	14,65	16,30	16,25
	Produksi (Ton Biji Kering)	4333	3477	10820	18127	10922

	2.3. Kacang Tanah					
	Luas Tanam (Ha)	6168	4216	4898	6117	3944
	Luas Panen (Ha)	3630	6415	4554	5980	4904
	Produktivitas (Kw/Ha)	15,30	15,68	15,65	15,85	16,35
	Produksi (Ton Biji Kering)	5554	10059	7127	9478	8020
	2.4. Kacang Hijau					
	Luas Tanam (Ha)	235	223	753	1138	1032
	Luas Panen (Ha)	217	238	764	1152	1046
	Produktivitas (Kw/Ha)	14,42	15,08	15,00	14,96	15,92
	Produksi (Ton Biji Kering)	313	359	1146	1723	1665
	2.5. Ubi Kayu					
	Luas Tanam (Ha)	12751	8411	8998	7967	8291
	Luas Panen (Ha)	10696	13065	9396	7923	7463
	Produktivitas (Kw/Ha)	188,86	208,50	208,50	208,91	210,16
	Produksi (Ton Ubi Basah)	202002	272406	195907	165520	156844
	2.6. Ubi Jalar					
	Luas Tanam (Ha)	1679	1235	1270	1119	710
	Luas Panen (Ha)	1546	1401	1149	1172	893
	Produktivitas (Kw/Ha)	145,76	152,78	152,78	154,38	154,99
	Produksi (Ton Ubi Basah)	22535	21405	17554	18093	13841
	Jumlah Palawija					
	Luas Tanam (Ha)	39460	29333	31773	40447	31641
	Luas Panen (Ha)	26735	30587	30682	33030	27195
	Produktivitas (Kw/Ha)	431,16	468,23	468,00	472,01	475,97
	Produksi (Ton Ubi Basah)	274732	351390	278207	247934	229716

NO	URAIAN	REALISASI LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI				
		2011	2012	2013	2014	2015
III	SAYURAN					
	3.1. Bawang Merah					
	Luas Tanam (Ha)	112	68	17	58	33
	Luas Panen (Ha)	124	67	24	56	37
	Produktivitas (Kw/Ha)	952,10	1210,45	1185,42	1146,79	1069,73
	Produksi (Ton)	11806	8110	2845	6422	3958
	3.2. Kentang					
	Luas Tanam (Ha)	18	34	55	8	2
	Luas Panen (Ha)	21	26	57	17	2
	Produktivitas (Kw/Ha)	2731,00	2560,38	1627,54	964,71	650,00
	Produksi (Ton)	5735	6657	9277	1640	130
	3.3. Kubis					
	Luas Tanam (Ha)	121	120	258	230	228
	Luas Panen (Ha)	146	58	253	246	227
	Produktivitas (Kw/Ha)	1363,00	1626,72	2085,77	2974,31	3266,43
	Produksi (Ton)	19900	9435	52770	73168	74148
	3.4. Cabe Besar					
	Luas Tanam (Ha)	1246	986	970	1193	1164
	Luas Panen (Ha)	1058	1149	1038	1049	1230
	Produktivitas (Kw/Ha)	725,76	1095,47	964,49	1306,45	1120,11
	Produksi (Ton)	76785	125869	100114	137047	137774
	3.5. Tomat					
	Luas Tanam (Ha)	745	610	695	794	679
	Luas Panen (Ha)	809	600	728	785	733
	Produktivitas (Kw/Ha)	1662,70	2291,97	2702,95	3510,70	3294,20
	Produksi (Ton)	134509	137518	196775	275590	241465
	3.6. Bawang Daun					
	Luas Tanam (Ha)	397	316	372	441	419
	Luas Panen (Ha)	332	331	374	463	406
	Produktivitas (Kw/Ha)	866,90	916,44	1111,87	1075,33	1021,45
	Produksi (Ton)	28781	30334	41584	49788	41471

3.7. Petsai						
Luas Tanam (Ha)	2266	1885	1612	1899	1530	
Luas Panen (Ha)	2329	1925	1709	1918	1540	
Produktivitas (Kw/Ha)	991,75	1067,78	1050,29	1261,88	1253,78	
Produksi (Ton)	230978	205547	179494	242029	193082	
3.8. Kacang Panjang						
Luas Tanam (Ha)	1209	981	955	1119	888	
Luas Panen (Ha)	1232	967	1002	1216	909	
Produktivitas (Kw/Ha)	704,79	1302,57	767,99	1674,94	1686,66	
Produksi (Ton)	86830	125959	76953	203673	153317	
3.9. Terung						
Luas Tanam (Ha)	549	476	402	561	435	
Luas Panen (Ha)	565	455	486	572	482	
Produktivitas (Kw/Ha)	1382,60	2292,26	2482,02	2558,62	2174,40	
Produksi (Ton)	78117	104298	120626	146353	104806	
3.10. Ketimun						
Luas Tanam (Ha)	1000	941	733	1093	950	
Luas Panen (Ha)	924	932	873	1138	936	
Produktivitas (Kw/Ha)	1160,56	1912,39	2426,09	2324,66	2252,08	
Produksi (Ton)	107236	178235	211798	264546	210795	
3.11. Kangkung						
Luas Tanam (Ha)	38	41	31	30	28	
Luas Panen (Ha)	36	49	30	30	32	
Produktivitas (Kw/Ha)	1027,22	813,27	982,33	794,67	753,13	
Produksi (Ton)	3698	3985	2947	2384	2410	
Jumlah Sayuran						
Luas Tanam (Ha)	7701	6458	6100	7426	6356	
Luas Panen (Ha)	7576	6559	6574	7490	6534	
Produktivitas (Kw/Ha)	13568,30	17090,00	17386,77	19593,10	18542	
Produksi (Ton)	784375	935947	995183	1402640	1163356	

NO	URAIAN	REALISASI LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI				
		2011	2012	2013	2014	2015
IV	BUAH-BUAHAN					
	Produksi (Kuintal)					
	1. Alpukat	22421	18648	22220	24292	27894
	2. Mangga	26593	62054	73571	123735	125579
	3. Rambutan	12180	19762	14705	23086	31663
	4. Durian	22465	56724	21241	50405	90125
	5. Duku	1488	2092	1955	4199	2548
	6. Jeruk	5656	24026	12138	8653	7419
	7. Jambu	26088	21655	18766	29331	40852
	8. Sawo	11577	12733	11425	13952	13376
	9. Pepaya	239979	235043	216051	235312	231010
	10. Nenas	2968	1879	2428	2367	1963
	11. Pisang	1130360	1288183	1067120	2019468	2029252
	12. Salak	171	1069	652	1107	984
	13. Belimbing	2287	3533	2841	2566	2381
	14. Nangka	66737	68855	35798	56312	51950
	15. Manggis	17067	22329	28965	27722	54183
	16. Sukun	1444	4369	3186	3990	6808
	17. Sirsak	4731	5986	8263	11258	10008
	Jumlah Buah-buahan	1594212	1848940	1541325	2637755	2727995

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal dan eksternal yang berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi maka terdapat tantangan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi antara lain :

- a. Luas wilayah, terutama wilayah yang memiliki keaneka ragaman komoditas unggulan berpotensi sebagai basis pengembangan agribisnis, karena sangat sesuai untuk tujuan pembangunan sektor pertanian yang berorientasi ekspor

- serta memiliki deposit kandungan mineral yang prospektif, sehingga membutuhkan SDM daerah yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan daerah;
- b. Potensi budaya Sukabumi dan sejarah lokal yang kaya dengan muatan dan nuansa adat istiadat serta tradisi dan kearifan lokal yang haus akan peningkatan ilmu, pengetahuan dan ketaqwaan;
 - c. Jumlah penduduk yang besar yang kalau dibina dan dididik secara terfokus akan melahirkan jajaran SDM terdidik dan terlatih yang mampu menjadi faktor penggerak utama pembangunan daerah;
 - d. Potensi ekonomi (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil dan pertambangan) daerah di sekitarnya, yang menjanjikan prospek sebagai lokasi kawasan industri berbasis sektor agrikultur, terutama industri pengolahan yang bahan bakunya adalah produk pertanian dan perkebunan, sehingga dapat dikelola sebagai basis pengembangan Pertanian ;
 - e. Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai salah pusat pengembangan Pertanian di pantai selatan Provinsi Jawa Barat;
 - f. Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemda dengan DPRD dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengembangkan bidang Pertanian;

Faktor Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian antara lain terdiri dari:

- a. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Sukabumi, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta rangkaian aturan perundangan lain telah menguatkan semangat dan keinginan untuk membangun *good governance*, termasuk di bidang Pertanian;
- b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi dunia usaha dan sektor swasta untuk mengembangkan kegiatan Pertanian yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Dalam RPJPD Tahap III atau RPJMD Ke-3 (2016–2021) ditujukan untuk menumbuhkembangkan produktivitas setiap wilayah sebagai pusat-pusat produksi yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Upaya tersebut bertujuan untuk mencapai kemandirian masyarakat pada setiap wilayah di Kabupaten Sukabumi dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Kabupaten Sukabumi terhadap pembangunan Jawa Barat dan pembangunan Nasional.

Untuk dapat melaksanakan amanat RPJPD Kabupaten Sukabumi dan melihat tingkat capaian pembangunan, khususnya di Tahap Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian berkaitan dengan tugas dan fungsinya antara lain terdiri dari :

- a. Fokus pembangunan ekonomi lokal belum berbasis agro industri
- b. SDM Aparatur (tenaga penyuluh) belum memenuhi standar kompetensi
- c. Belum optimalnya kualitas kompetensi Kelompok Tani/Gapoktan
- d. Belum adanya pasar komoditas untuk petani
- e. Belum sepenuhnya pelaksanaan Perda LP2B
- f. Belum terwujudnya indikator makro agribisnis
- g. Menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian
- h. Belum optimalnya produksi pangan
- i. Belum berkembangnya sentra produksi pertanian
- j. Rendahnya tingkat produksi dan produktivitas komoditi pertanian non pangan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pada lingkungan internal, terdapat faktor *kekuatan* dan faktor *kelemahan*. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Pertanian untuk mengubah atau mempengaruhinya.

1. Unsur Kekuatan, antara lain terdiri dari:

- a. Luas wilayah, terutama wilayah yang memiliki keaneka ragaman komoditas unggulan berpotensi sebagai basis pengembangan agribisnis, karena sangat sesuai untuk tujuan pembangunan sektor pertanian yang berorientasi ekspor serta memiliki deposit kandungan mineral yang prospektif, sehingga membutuhkan SDM daerah yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pembangunan daerah;
- b. Potensi budaya Sukabumi dan sejarah lokal yang kaya dengan muatan dan nuansa adat istiadat serta tradisi dan kearifan lokal yang haus akan peningkatan ilmu, pengetahuan dan ketaqwaan;
- c. Jumlah penduduk yang besar yang kalau dibina dan dididik secara terfokus akan melahirkan jajaran SDM terdidik dan terlatih yang mampu menjadi faktor penggerak utama pembangunan daerah;
- d. Potensi ekonomi (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri kecil dan pertambangan) daerah di sekitarnya, yang menjanjikan prospek sebagai lokasi kawasan industri berbasis sektor agrikultur, terutama industri pengolahan yang bahan bakunya adalah produk pertanian dan perkebunan, sehingga dapat dikelola sebagai basis pengembangan Pertanian ;
- e. Tingginya komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menjadikan Kabupaten Sukabumi sebagai salah pusat pengembangan Pertanian di pantai selatan Provinsi Jawa Barat;
- f. Kondusifnya suasana hubungan kerja kemitraan antara Pemda dengan DPRD dalam proses dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam mengembangkan bidang Pertanian;

Adapun **Unsur Kelemahan**, antara lain terdiri dari:

- a. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian, yang membutuhkan penyegaran dan penyempurnaan yang bersifat terus-menerus, sehingga mudah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan zaman;

- b. Kualifikasi dan kompetensi SDM Dinas Pertanian, baik tenaga perencanaan program, perencanaan bidang kewenangan dan tugas pokok dan fungsi, perencanaan anggaran maupun kualifikasi tenaga Pertanian yang membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan;
- c. Tugas pokok dan fungsi masing-masing yang masih perlu disesuaikan dengan bidang kewenangan dalam rangka sinkronisasi tugas pokok dengan program dan kegiatan turunannya;
- d. Tingginya pengaruh model perencanaan proyek di kalangan para pejabat dan staff sehingga masih kesulitan dalam menyusun rencana program berbasis kinerja secara terukur;

Sama dengan analisis atas lingkungan internal, maka pada analisis lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor utama, yakni faktor *peluang* dan faktor *ancaman*. Karena bersifat eksternal, sebagian besar dari faktor peluang dan ancaman berada di luar jangkauan pemerintah daerah untuk mempengaruhinya. Atau paling tidak, kemampuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi faktor peluang dan ancaman adalah lebih terbatas.

I. Faktor Peluang, antara lain terdiri dari:

- a. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Sukabumi, Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta rangkaian aturan perundangan lain telah menguatkan semangat dan keinginan untuk membangun *good governance*, termasuk di bidang Pertanian;
- b. Terbukanya kesempatan yang luas bagi dunia usaha dan sektor swasta untuk mengembangkan kegiatan Pertanian yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal

II. Faktor Ancaman, antara lain terdiri dari:

- a. Adanya berbagai sub-wilayah yang belum memiliki infrastruktur sosial ekonomi dan fisik yang kurang memadai, terutama jaringan jalan raya, infrastruktur fasilitas air bersih, dan, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan Pertanian;

- b. Belum meratanya sebaran geografis pusat-pusat layanan Pertanian antar kecamatan, sehingga angka partisipasi murni dan kasar Pertanian dasar dan menengah belum merata antar kecamatan dan antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan;
- c. Masih tersisanya tradisi dan pemikiran lama di kalangan sejumlah penduduk sehingga belum berminat untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah karena diparlakukan sebagai tenaga kerja untuk mencari nafkah keluarga;
- c. Tingginya angka kerusakan fasilitas infrastruktur fisik sehingga menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi masa bhakti 2016 – 2021 sebagaimana dituangkan dalam RPJM Daerah kabupaten Sukabumi , 2016 – 2021. Visi Pembangun Kabupaten Sukabumi adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi sejahtera dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat seperti yang tergambar pada gambar berikut.

Gambar Hubungan Antar Elemen Visi Pembangunan Kabupaten Sukabumi



Elemen visi pembangunan **Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius** pada intinya adalah pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan pembangunan daerah dengan tetap berpegang pada moral dan akhlak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Diharapkan, akhir dari pelaksanaan pembangunan akan terbentuk suatu tatanan perikehidupan yang religius, toleransi, dan harmonis dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi yang bermartabat dan berdaya saing.

Kemandirian Masyarakat Kabupaten Sukabumi akan menjadi cerminan utuh dan menyeluruh dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi. Hal ini dikarenakan visi pembangunan daerah memberi penekanan pada peningkatan kualitas dan daya saing sebagai modal dasar dalam membentuk kemandirian setiap individu masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Kemandirian masyarakat yang tercantum dalam visi dan misi Bupati Sukabumi, ditekankan dalam hal "pemberdayaan" (*empowerment*). Pada hakekatnya upaya-upaya pembangunan di masyarakat memfokuskan pada pemberdayaan dengan melakukan *power sharing* agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesetaraan dengan beragam stakeholders lainnya, dan untuk menoptimalkannya dilakukan dengan information sharing agar pemahaman antara masyarakat dapat setara pula dengan stakeholders lain.

Dalam mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien maka di dukung dengan Misi yang dipandang sebagai pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholders* pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;**
- 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;**
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan**
- 4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.**

Penyesuaian rumusan visi, misi dan arah kebijakan teknis bidang Pertanian ini dengan RPJM Daerah adalah untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan makro kabupaten dengan perencanaan mikro bidang kewenangan Pertanian. Selain itu, perujukan visi, misi dan arah kebijakan strategis pasangan Bupati dan Wakil Bupati juga dilakukan karena Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJM, yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan makro skala Kabupaten.

Dari keempat misi tersebut yang berkaitan langsung dengan Dinas Pertanian terutama adalah Misi yang pertama yaitu **Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan.**

Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian

masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian;
2. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan;
3. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta melindungi hak-hak pekerja
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan
6. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi local;
7. Meningkatkan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan;
8. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
9. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*);
10. Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Kepada Masyarakat;
11. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing;
12. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung perekonomian.

Berdasarkan tujuan pembangunan daerah sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi diatas tujuan yang yang relevan dengan Dinas Pertanian adalah :

➤ **Tujuan 1: Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian**

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mewujudkan ketahanan pangan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah, perlu adanya suatu upaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui pengembangan agribisnis yang merupakan

salah satu alternatif pengembangan nilai tambah industri pengolahan dan sektor pertanian serta memperkuat sistem lembaga keuangan bagi usaha tani. Sebagai daerah yang memiliki berbagai produk unggulan pertanian, Kabupaten Sukabumi layak untuk mengembangkan dan memberdayakan setiap subsektor pertanian yang kompeten untuk menjadi basis peningkatan perekonomian masyarakat utamanya petani.

Guna meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pertanian dan perkebunan
- b. Meningkatnya Produksi Pangan.
- c. Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian
- d. Meningkatnya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian :
- e. Meningkatnya adopsi teknologi pertanian
- f. Terlaksananya intervensi pencegahan dan penanggulangan rawan pangan Serta Teratasinya kerawanan pangan
- g. Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
- h. Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi local
- i. Meningkatnya diversifikasi olahan hasil pertanian.
- j. Meningkatnya produksi pertanian non pangan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-3 (2015-2019) sebagai kelanjutan dari RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) yang telah berakhir. RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan kompetitif perekonomian yang berbasis sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan RPJPN 2005-2025.

Pada RPJMN tahap-3 (2015-2019), sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap

tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya mencapai target sukses pembangunan pertanian pada RPJMN tahap-2 (2010-2014) yang meliputi (1) peningkatan swasembada berkelanjutan padi dan jagung dan swasembada kedelai, gula dan daging sapi, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani melalui strategi yang dikemas dalam 7 Gema Revitalisasi yang meliputi (1) revitalisasi lahan, (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan, (3) revitalisasi infrastruktur pertanian, (4) revitalisasi SDM petani, (5) revitalisasi permodalan petani, (6) revitalisasi kelembagaan petani, dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir. Sampai saat ini telah banyak capaian yang diwujudkan meskipun masih perlu ditingkatkan.

Maka visi Kementerian Pertanian adalah: Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah :

1. Mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan.
3. Mewujudkan kesejahteraan petani.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2015-2019 yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah :

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
6. Akuntabilitas kinerja aparat pemerintah yang baik

Peningkatan Kedaulatan Pangan adalah bagian dari agenda 7 Nawa Cita (Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik). Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan:

- (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri;
- (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan
- (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Untuk tetap meningkatkan dan memperkuat kedaulatan pangan, sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

- a. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi padi diutamakan ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Produksi kedelai diutamakan untuk mengamankan pasokan pengrajin dan kebutuhan konsumsi tahu dan tempe. Produksi jagung ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan keragaman pangan dan pakan lokal. Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga, demikian pula produksi gula dalam negeri ditargetkan untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga.
- b. Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga.
- c. Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 (2019).
- d. Terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi 600 ribu Ha untuk menggantikan alih fungsi lahan.

- e. Terlaksananya rehabilitasi 1,75 juta Ha jaringan irigasi sebagai bentuk rehabilitasi prasarana irigasi sesuai dengan laju deteriorasi.
- f. Beroperasinya dan terpeliharanya jaringan irigasi 2,95 juta Ha.
- g. Terbangunnya 132 ribu Ha layanan jaringan irigasi rawa untuk pembangunan lahan rawa yang adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 strategi utama, meliputi:

- a. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- b. Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.
- c. Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat.
- d. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e. Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

Strategi Kementerian Pertanian Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan Tujuh Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan
2. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian
3. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit
4. Penguatan kelembagaan petani
5. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian
6. Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi
7. Penguatan jaringan pasar produk pertanian

Selain tujuh strategi utama, terdapat Sembilan Strategi Pendukung sebagai berikut :

1. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian
2. Peningkatan dukungan perkarantinaan
3. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi
4. Pelayanan informasi publik
5. Pengelolaan regulasi
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pengelolaan perencanaan
8. Penataan dan penguatan organisasi
9. Pengelolaan sistem pengawasan

3.4. Telaahan Renstra Dinas Pertanian Propinsi Jawa barat

Memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan ketersediaan teknologi maju di Jawa Barat yang sangat menunjang dalam pembangunan pertanian, serta mengacu pada Visi Jawa Barat yaitu “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Provinsi Termaju di Indonesia Tahun 2025”, serta Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat “Jawa Barat yang Maju dan Sejahtera untuk Semua”, maka Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat menetapkan visi yaitu : “Terwujudnya Pertanian dan Hortikultura Jawa Barat yang Maju dan Tangguh”.

Untuk dapat mewujudkan visi dengan cara mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka ditetapkan misi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

Misi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi, kualitas dan nilai tambah produk tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia pertanian.
3. Meningkatkan dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan sarana prasarana pertanian.
4. Mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan teknologi pertanian berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan akses pasar dan permodalan

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemafaatan ruang di Kabupaten Sukabumi, diperlukan pengaturan penataan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdayaguna, berhasilguna, berbudaya dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah. Didalam RTRW terdapat Kawasan budi daya yang merupakan wilayah yang ditetapkan dengan ungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Selain kawasan budidaya, didalam RTRW erdapat Kawasan agropolitan yang merupakan kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai siste produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem pemukiman dan sistem agribisnis.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri menuju kabupaten yang maju dan sejahtera. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain yang terkait dengan bidang pertanian adalah kebijakan pengembangan sentra agribisnis berorientasi agropolitan .

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah Pengembangan sentra agribisnis berorientasi agropolitan, maka ditetapkan strategi meliputi :

- a. Meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran.
- b. Mengembangkan kawasan agribisnis berorientas agropolitan
- c. Mempertahankan kawasan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (LP2B).

Rencana Kawasan Budidaya yang peruntuknya untuk pertanian terdiri dari :

- a. Kawasan peruntukan pertanian yang meliputi pertanian lahan basah dan pertaian lahan kering. Pertanian lahan basah seluas kurang lebih 47.848 hektar berupa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(LP2B) berada di seluruh kecamatan.
- b. Kawasan peruntukan hortikultura seluas kurang lebih 5.815 hektar meliputi :
 - Tanaman sayuran seluas 5.000 hektar tersebar di 47 kecamatan.
 - Tanaman buah-buahan seluas kurang lebih 770 hektar tersebar di 47 kecamatanterdiri dari :

- a. Pengembangan manggis seluas 150 hektar di kecamatan Cicantayan dan Cikembar
- b. Pengembangan sirsak ratu seluas 50 hektar di kecamatan Bantargadung dan Palabuhanratu.
- c. Pengembangan pepaya seluas 50 hektar di kecamatan Kalapanunggal, Parakansalak, Kabandungan, Cidahu dan Cicurug.
- d. Pengembangan rambutan seluas 50 hektar di kecamatan Warungkiara.
- e. Pengembangan durian seluas 100 hektar di kecamatan Cikakak dan Cikidang
- f. Pengembangan pisang ambon putih seluas 50 hektar di kecamatan Sukabumi, Cibadak, Caringin dan Cicurug.
- g. Pengembangan pisang tandun seluas 200 hektar di kecamatan Cisolok, Palabuhanratu, Bantargadung, Simpenan, Ciemas, Surade dan Cidolog.
- h. Pengembangan semangka dan melon seluas 20 hektar di kecamatan Ciemas, Ciacap dan Surade.
- i. Pengembangan rempah-rempahan dan biofarmaka seluas kurang lebih 100 hektar di kecamatan Ciemas, Waluran, Lengkong, Cibitung, Cikidang, Cicurug, Nagrak dan Ciambar.
- j. Pengembangan tanaman hias seluas 45 hektar di kecamatan Sukabumi, Cicurug dan Sukaraja.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang dijabarkan melalui fenomena pembangunan daerah Kabupaten Sukabumi selama ini, serta kajian dari isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, maupun isu dan kebijakan strategis Provinsi Jawa Barat, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukabumi pada periode 2016-2021 yang berkaitan dengan sektor pertanian adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Agribisnis

Perkembangan agribisnis yang belum mampu membangun daya saing yang tinggi dan gagal memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki. Dalam perekonomian nasional, umumnya sektor pertanian secara tradisional dikenal sebagai sektor penting sebagai sumber utama pangan dan pertumbuhan ekonomi. Tingginya kontribusi sektor pertanian belum diimbangi dengan pemanfaatan produk pertanian

secara optimal dan berkualitas. Peningkatan nilai tambah pada produk pertanian akan memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Sukabumi sehingga perumusan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah periode ini harus fokus pada pengembangan nilai tambah sektor pertanian.

Dalam kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Sukabumi disebutkan bahwa pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan.

Selanjutnya strategi pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan minapolitan, meliputi :

- Meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
- Mengembangkan kawasan agribisnis berorientasi agropolitan;
- Mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
- Mengembangkan kawasan minapolitan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh atau KSCT, Kabupaten Sukabumi menetapkan KSCT sebanyak 6 lokasi, KSCT ditetapkan mengacu pada Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sukabumi.

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Sukabumi adalah :

- a) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agrowisata Cicurug di Kecamatan Cicurug.
- b) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agrowisata berbasis *Adventure* Sukasirna dan sekitarnya di Kecamatan Cibadak.
- c) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Agrowisata dan Pertanian di Kecamatan Sukabumi.
- d) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pertanian dan Agrowisata di Kecamatan Sukalarang.
- e) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Minapolitan dan Pariwisata di Kecamatan Palabuhanratu.
- f) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Wisata berbasis konservasi, Pertanian dan Perikanan Tangkap di Kecamatan Ciracap.

Kawasan Budidaya Bunga dan Daun Potong

Salah satu kawasan strategis cepat tumbuh adalah wilayah Sukabumi dan Sukaraja yang peruntukkannya untuk agrowisata dan pertanian. Salah satu komoditi pertanian yang juga dapat dijadikan sebagai obyek agrowisata adalah budidaya bunga dan daun potong. Penetapan komoditi ini juga seiring dengan kebiasaan masyarakat Kecamatan Sukabumi dan sekitarnya dalam kegiatan usaha taninya. Salah satu target yang ingin diwujudkan dalam Kabuddapo adalah mewujudkan kampung flori.

Khusus Kawasan bunga dan daun potong kecamatan yang teridentifikasi ada tujuh kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Sukabumi
2. Kecamatan Sukaraja
3. Kecamatan Cidahu
4. Kecamatan Cicurug
5. Kecamatan Nagrak
6. Kecamatan Cibadak
7. Kecamatan Kadudampit

b. Penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan

Kawasan Budidaya sebesar 55% termasuk alokasi untuk lahan sawah beririgasi teknis sebagai lahan sawah abadi, telah dapat diimplementasikan secara konsisten. Selanjutnya implementasi perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum optimal, terutama terkait insentif dan disinsentif sehingga resiko alih fungsi lahan sawah masih sangat tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu di optimalisasi pelaksanaan perda LP2B dan produk turunannya.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Pembangunan

Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, rencana pembangunan daerah memiliki fokus pada peningkatan dan pemerataan kesejahteraan wilayah secara berkesinambungan dan konsisten. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya wilayah perdesaan maupun pelosok-pelosok di Kabupaten Sukabumi yang masih cukup sulit dijangkau untuk menikmati hasil pembangunan daerah baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perhatian penuh pemerintah daerah bagi peningkatan kualitas aksesibilitas wilayah menjadi salah satu pondasi utama dalam perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Sukabumi pada periode ini.

Berdasarkan pada pandangan di atas dan sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta selaras dengan hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka untuk Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depan ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”

Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Dari dua elemen tersebut maka dapat ditelaah bahwa kepala daerah ingin membangun Kabupaten Sukabumi menjadi sejahtera dengan tetap mempertahankan moral religiusitas dan kemandirian masyarakat.

4.2 Misi

Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;**
2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;**
3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan**
4. **Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.**

Dari keempat Misi tersebut yang terkait dengan pembangunan Pertanian adalah Misi yang pertama yaitu **Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan.**

Perekonomian daerah dibangun atas dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, konsisten, dan berkualitas. Pembangunan melalui pengembangan perekonomian menjadi penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah. Kualitas perekonomian daerah akan menjadi sorotan berbagai pelaksana pembangunan dalam meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Sukabumi dititikberatkan pada daya saing dalam pengembangan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Perekonomian daerah saat ini masih perlu adanya pembenahan baik dari segi besaran nilai ekonomi maupun pemerataan bagi masyarakat. Disamping itu, pengelolaan SDA secara maksimal dan bijaksana perlu dilakukan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan maka perekonomian makro maupun mikro terus dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini perlu didukung dengan adanya penciptaan iklim usaha baik dan kompetitif serta pendampingan usaha bagi masyarakat agar peningkatan dan stabilitas perekonomian dapat terealisasi. Peningkatan sektor pariwisata juga bisa menjadi alternatif strategis dalam pengembangan UMKM utamanya masyarakat di area obyek wisata. Selain itu, wisatawan yang masuk akan menjadi salah satu investasi dalam peningkatan nilai tambah sektor tersebut.

Pada perekonomian makro, perluasan pembangunan ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya.

Sedangkan dalam pengembangan perekonomian mikro, masyarakat dituntut untuk menggerakkan diri dengan berfokus pada pergerakan perekonomian kerakyatan yang memiliki stabilitas lebih tinggi serta memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Masih tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat mengindikasikan rendahnya pemerataan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sukabumi. Sehingga perlu adanya perhatian khusus pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat secara merata, optimal dan konsisten dengan tetap berpegang pada keberlanjutan lingkungan hidup.

4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan suatu tingkatan prioritas tertinggi dalam rumusan kebijakan pada perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka arahan tujuan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama periode pembangunan 2016-2021 yang berkaitan dengan Pertanian adalah **Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian.**

Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mewujudkan ketahanan pangan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah, perlu adanya suatu upaya untuk mewujudkan hal tersebut melalui pengembangan agribisnis yang merupakan salah satu alternatif pengembangan nilai tambah industri pengolahan dan sektor pertanian serta memperkuat sistem lembaga keuangan bagi usaha tani. Sebagai daerah yang memiliki berbagai produk unggulan pertanian, Kabupaten Sukabumi layak untuk mengembangkan dan memberdayakan setiap subsektor pertanian yang kompeten untuk menjadi basis peningkatan perekonomian masyarakat utamanya petani.

Guna meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian, maka sasaran pembangunan Dinas Pertanian yang harus dicapai adalah:

- a. Meningkatnya kesempatan kerja di sektor pertanian dan perkebunan
- b. Meningkatnya Produksi Pangan.
- c. Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian
- d. Meningkatnya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian
- e. Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian, perkebunan dan perternakan
- f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan tani berorientasi agribisnis berbasis potensi local
- g. Meningkatnya diversifikasi olahan hasil pertanian
- h. Meningkatnya produksi pertanian non pangan

Dalam melihat keterkaitan dan hierarki visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Sukabumi periode pembangunan 2016-2021 yang berkaitan dengan Tupoksi dari Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 bagi Dinas Pertanian

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan Mandiri				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
Misi 1 Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis, parwisata, dan industri berwawasan lingkungan	Membangun Budaya Organisasi Pemerintahan Yang Bersih, Peduli dan Profesional	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas birokrasi	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar
		Tingkat disiplin aparatur		
	Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis, lembaga keuangan pertanian	Kesempatan Kerja Di bidang Agribisnis	Terciptanya kesempatan kerja di sektor agribisnis	Jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan perkebunan
		Jumlah Produksi Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya produksi pangan	Jumlah produksi hasil pertanian dan perkebunan
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Tani Berorientasi Agribisnis Berbasis Potensi Lokal	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	Jumlah kelembagaan Gapoktan
		Sentra Komoditi Pertanian dan	Terwujudnya sentra	Berkembangnya sentra komoditas hortikultura

		Perkebunan	produksi pertanian dan perkebunan	Pengembangan, pemasaran dan promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah
		Jumlah Produksi Pertanian Non Pangan	Meningkatnya produksi pertanian non pangan	Jumlah produksi perkebunan rakyat (Ton)
				Jumlah produksi perkebunan besar (Ton)

Dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Ekonomi Lokal terutama Melalui Bidang Agribisnis Yang Berwawasan Lingkungan, maka strategi yang harus dicapai dilakukan adalah :

Tabel 4.2. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran dari Misi 1

NO	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Membangun Budaya Organisasi Pemerintahan Yang Bersih, Peduli dan Profesional	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas birokrasi	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan Dinas Pertanian
2.	Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis, lembaga keuangan pertanian	Terciptanya kesempatan kerja di sektor agribisnis	Meningkatkan kesempatan kerja di bidang pengolahan produksi pertanian dan perkebunan dan pengembangan usaha kelompok tani
		Meningkatnya produksi pangan	Meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian dan perkebunan
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Tani Berorientasi Agribisnis Berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
		Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian dan Perkebunan	Mengembangkan Sentra komoditas hortikultura, perkebunan dan pemasaran serta promosi hasil pertanian
		Meningkatkan Produksi Pertanian Non Pangan	Meningkatkan jumlah produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar

Pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan

strategi sebagai **prioritas pembangunan** (*strategy focused organization*) enam tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah digambarkan di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 terdapat enam prioritas pembangunan yaitu:

1. Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Pengembangan Agribisnis;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha;
4. Peningkatkan Kemampuan Daerah dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Melalui Layanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Agama, Budaya, Pemuda Dan Olahraga;
6. Peningkatkan Efektivitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah serta Membangun Budaya Birokrat Pelayan Masyarakat.

Berdasarkan prioritas diatas yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Pertanian dijelaskan dengan uraian berikut :

1. Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis

Dalam kehidupan manusia terdapat tiga utama kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pokok manusia berupa pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia untuk hidup dan untuk dapat beraktifitas. Kabupaten Sukabumi merupakan daratan dengan aneka sumberdaya yang berpotensi tinggi, lahan-lahan potensial dalam bidang pertanian sebagai bahan pokok pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menyikapi isu/permasalahan di masa depan tentang kurangnya ketersediaan bahan pokok pangan, Kabupaten Sukabumi harus mulai mewaspadaikan dan menyasiasi ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang krusial karena hal ini akan memberi dampak pada sektor-sektor yang sedang berjalan.

Ketahanan pangan menurut UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dengan adanya hal itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan, yang menyatakan bahwa

penyediaan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Peran aktif pemerintah dan masyarakat khususnya Kabupaten Sukabumi sangat diperlukan dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan secara sinergi. Sehingga dengan memiliki ketahanan pangan, daerah akan memiliki ketersediaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

2. Pengembangan ekonomi kerakyatan

Pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dimaksudkan untuk penggalian potensi-potensi kemandirian dan pengembangan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi strategis dalam pengelolaan sumber daya alam/agraria secara adil dan berkelanjutan. Pengembangan SDA harus dalam pengontrolan dan pengelolaan pemerintah berdasarkan asas kerakyatan. Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal hendaknya memperhatikan akar budaya dan kearifan lokal masyarakat. Selain itu, dalam menumbuh-kembangkan model-model pengembangan ekonomi berbasis rakyat perlu adanya dasar keswadayaan dan kemandirian dengan diperkuat institusi dan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Upaya pengembangan ekonomi rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional yang dimulai dari perekonomian daerah. Salah satu upaya dalam menyiasati strategi ini yakni dengan mengupayakan pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal daerah. Melalui pengembangan ekonomi lokal daerah, maka secara langsung potensi-potensi daerah dapat terangkat dan berkembang sehingga akan membantu mempertanggung perekonomian daerah.

Pengembangan agribisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai industri berbasis sumber daya. Agribisnis berpotensi dapat meningkatkan cadangan devisa serta penyediaan lapangan kerja (khususnya pada Kabupaten Sukabumi) yang mempunyai potensi dalam mengkolaborasikan sentra pertanian dengan sentra bisnis. Pengembangan agribisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya

dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek.

3. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kesempatan Usaha

Pekerjaan merupakan aktifitas manusia yang menghasilkan sesuatu baik barang ataupun berupa uang. Barang dan uang yang dihasilkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik apabila manusia mempunyai pekerjaan, agar dihasilkan sesuatu sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Sukabumi. Kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan. Diperlukan campur tangan dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien.

Kondisi daerah yang kondusif merupakan prasyarat utama dalam membuka dan memperluas lapangan usaha. Selain kondisi daerah yang memadai, SDM daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing manusia di Kabupaten Sukabumi dan peningkatan infrastruktur daerah merupakan modal dasar dalam upaya penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM yang berkualitas, sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan dan perluasan kesempatan kerja merupakan *impact* dari peningkatan SDM dan infrastruktur.

4. Peningkatkan Kemampuan Daerah Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan kata yang cukup kompleks, karena ia mengandung beberapa unsur untuk dapat mencapai sejahtera. Sejahtera dapat dikatakan sebagai “bahagia dan berkecukupan dalam segala hal”, dan segala aspek kehidupan manusia berpengaruh dalam mencapai sejahtera. Peningkatan kemampuan daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan upaya mengatasi kemiskinan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan perlu melakukan efektifitas kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat

miskin. Dengan adanya pengefektifan berbagai strategi pengentasan kemiskinan, diharapkan terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, ketepatan sasaran penerima bantuan dan perlindungan sosial perlu diperhatikan agar pengentasan kemiskinan berdampak efektif dan efisien dalam mengurangi beban masyarakat.

Upaya memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin memiliki kesempatan keluar dari garis kemiskinan dan terus menjaga perekonomiannya agar tidak kembali ke dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini sangat diperlukan karena upaya pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memiliki dampak panjang dalam kestabilan perekonomian masyarakat. Selain itu, dengan melakukan strategi pemberdayaan, diharapkan masyarakat berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan segala potensi SDM maupun SDA di masing-masing wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu melakukan upaya berupa meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang agar dapat mendayagunakan segala potensi dengan tepat untuk pencapaian pembangunan daerah. Selain itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan serta peningkatan kualitas udara dan perairan perlu dilakukan demi mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas.

Mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan berkualitas perlu didukung oleh upaya penegakan hukum lingkungan secara efektif dan adil sehingga keseimbangan antara integritas undang-undang dan lingkungan alam sekitar tetap terjaga. Sinergi antara peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai persiapan menghadapi dinamika pasar global perekonomian. Perlu disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan perekonomian yang bersifat fisik dan memanfaatkan sumber daya alam mengandung resiko berupa dampak perubahan ekosistem baik secara negatif maupun positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi terkait pembangunan berwawasan sosial ekonomi dengan berwawasan lingkungan. Secara nyata, hal ini dapat diupayakan dengan meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga komponen ekosistem alam dan kehidupan manusia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan Pembangunan Pertanian selaras dengan arah kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sukabumi periode 2016 sampai 2021. Pada Tahun

pertama (2016) arah kebijakannya adalah “Mewujudkan Pembangunan Kab Sukabumi yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas, kemandirian dan daya saing”, Tahun kedua (2017) adalah Peningkatan Kualitas Daya saing SDM dengan Penyediaan Infrastruktur yang Memadai, Tahun Ketiga (2018) adalah Penguatan Perekonomian lokal yang kondusif dengan didukung oleh Pemerataan Pembangunan Wilayah, Tahun Keempat (2019) adalah Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui penurunan kesenjangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tahun Kelima (2020) adalah Penguatan reformasi birokrasi pada seluruh aspek pembangunan dan pada tahun terakhir (2021) arah kebijakannya adalah Pemantapan Kemandirian masyarakat pada aspek sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2016-2021.

Program-program pembangunan Kabupaten Sukabumi untuk periode 2016-2021 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing kebijakan umum. Program-program tersebut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi Bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra SKPD.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi termasuk Dinas Pertanian. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

Melalui Misi yang terkait dengan Tupoksi Dinas yaitu **Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi ekonomi lokal melalui sektor agribisnis**, didukung dengan Program wajib berupa Urusan Pangan yaitu Program untuk mendukung misi ini adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Sedangkan urusan pilihannya adalah Urusan Pertanian melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program-program pembangunan Pertanian untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing kebijakan umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1. Program Pembangunan Pertanian Tahun 2016 - 2021

Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program
1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian			
Terciptanya Kesempatan kerja disektor agribisnis	Meningkatkan kesempatan kerja di bidang pengolahan produksi pertanian dan	Penumbuhan wirausahawan baru di sektor pertanian dan perkebunan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program
	perkebunan dan pengembangan usaha kelompok tani		
Meningkatnya Produksi Pangan	Meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian dan perkebunan	Intensifikasi pertanian, dan perkebunan, Pengembangan sarana dan alat mesin pertanian dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Tani Berorientasi Agribisnis Berbasis Potensi Lokal	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian dan perkebunan	Mengembangkan Sentra komoditas hortikultura, perkebunan dan pemasaran serta promosi hasil pertanian	Deliniasi sentra agribisnis dan penetapan sentra berbasis kawasan, Diversifikasi olahan dan pemasaran hasil pertanian	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Meningkatnya produksi pertanian non pangan	Meningkatkan jumlah produksi perkebunan rakyat dan perkebunan besar	Intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi komoditi pertanian non pangan	Program Peningkatan Produksi Pertanian

Adapun Kegiatan-kegiatan untuk setiap Program diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan meliputi kegiatan :

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
- b. Optimalisasi Balai Benih Induk Padi Sawah
- c. Pengembangan Infrastruktur Pertanian
- d. Peningkatan Produksi melalui Prasarana dan Sarana Pertanian
- e. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- f. Optimalisasi Kebun Dinas
- g. DAK Reguler Bidang Pertanian
- h. Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)

- i. Kemitraan Usaha melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan
- j. Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP Pendampingan)
- k. Perluasan Cetak Sawah
- l. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian
- m. Pengamanan Produksi Padi, Palawija dan Hortikultura
- n. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan
- o. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani meliputi Kegiatan :

- a. Pengembangan Pasca Panen dan Produk Olahan Padi, Palawija dan Hortikultura
- b. Pengembangan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian
- c. Pengembangan Kawasan Buah-Buahan
- d. Pengembangan Kawasan Sayuran
- e. Pengembangan Kawasan Biofarmaka
- f. Pengembangan Kawasan Florikultura (Bunga dan Daun Potong)
- g. Pengembangan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Komoditas Perkebunan
- h. Penguatan Kompetensi Manajemen Kelembagaan dan Aksesibilitas Permodalan Usaha Perkebunan
- i. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian
- j. Pelayanan Penyuluhan Pertanian
- k. Pengelolaan Ketenagaan Penyuluh (PKP)
- l. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
- m. Pengembangan Pos Penyuluhan Pedesaan (Posluhdes)
- n. BOP Penyuluh Pertanian
- o. Pengelolaan tenaga penyuluh (THL-TBPP)
- p. Pengembangan Pisang di Wilayah Jabar Selatan
- q. Pembangunan Infrastruktur Perkebunan

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian

- a. Intensifikasi Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan
- b. Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar
- d. Pengolahan Data Statistik Perkebunan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD 2016-2021 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Sukabumi pada kurun waktu 2016-2021.

Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

TABEL 6.1. Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan agribisnis dan lembaga keuangan pertanian	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas birokrasi	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	100	100	100	
	Terciptanya kesempatan kerja di sektor agribisnis	Jumlah tenaga kerja sektor pertanian, perkebunan (Orang)	200	200	200	200	200	200	
			116.300	117.000	122.850	128.993	135.442	142.214	
	Meningkatnya Produksi Pangan	Jumlah Produksi (Ton) :	- Padi	885.882	894.741	903.600	912.458	921.317	921.317
			- Jagung	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000	39.000
			- Kedelai	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			- Ubi kayu	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000	170.000
			- Cabe	27.450	28.000	28.560	29.131	29.713	29.713
			- Tomat	24.630	25.133	25.636	26.149	26.672	26.672
			- Bawang merah	403	412	420	428	437	437
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Tani Berorientasi Agribisnis Berbasis Potensi Lokasi	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	0	0	0	25	25	25	
	Terwujudnya Sentra Produksi Pertanian dan Perkebunan	Berkembangnya sentra komoditas hortikultura (Desa):	Cabe	42	44	46	48	50	50
			Bawang Merah	9	10	11	12	13	13
			Manggis	16	17	18	19	20	20
			Pepaya	16	17	18	19	20	20

		Pisang	12	14	16	18	20	20
		Jambu Kristal	6	7	8	9	10	10
		Bunga dan Daun Potong	15	16	17	18	19	19
		Biofarmaka	7	8	9	10	11	11
		Pengembangan Pemasaran dan promosi atas hasil produksi pertanian, perkebunan unggul daerah						
		- Pemasaran dan promosi hasil pertanian	5	5	5	5	5	5
		- Pemasaran dan promosi hasil perkebunan	5	5	5	5	5	5
	Meningkatnya Produksi Pertanian Non Pangan	Jumlah produksi perkebunan Rakyat (Ton) :	53.219	53.854	54.489	55.124	55.759	56.378
		Jumlah produksi perkebunan besar (Ton) :	15.634	16.089	16.544	16.999	17.454	17.906

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian output dan outcome program Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai.

BAB VII PENUTUP

Dokumen Revisi Rencana Strategis (Renstra) 1 Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun lima tahunan yang berorientasi produksi dan produktivitas pertanian, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi disusun dengan mengakomodir Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015 - 2019, Renstra Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabum Tahun 2009 – 2029 dan dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sukabumi.

Dokumen ini diharapkan dapat mensinergikan pembangunan pertanian khususnya di Kabupaten Sukabumi untuk lima tahun kedepan (Tahun 2016 - 2021). Tugas melaksanakan pembangunan pertanian tersebut bukanlah tugas yang ringan. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam Renstra ini tentunya tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder dengan mempertimbangkan optimalisasi potensi sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.

Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah menyampaikan saran dan kontribusinya dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021. Semoga Allah SWT meridhoi dan selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua untuk melaksanakan pembangunan pertanian di Jawa Barat sehingga tercapai kesejahteraan petani dan kemajuan bangsa, Amiin.

Sukabumi, Januari 2019

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sukabumi,



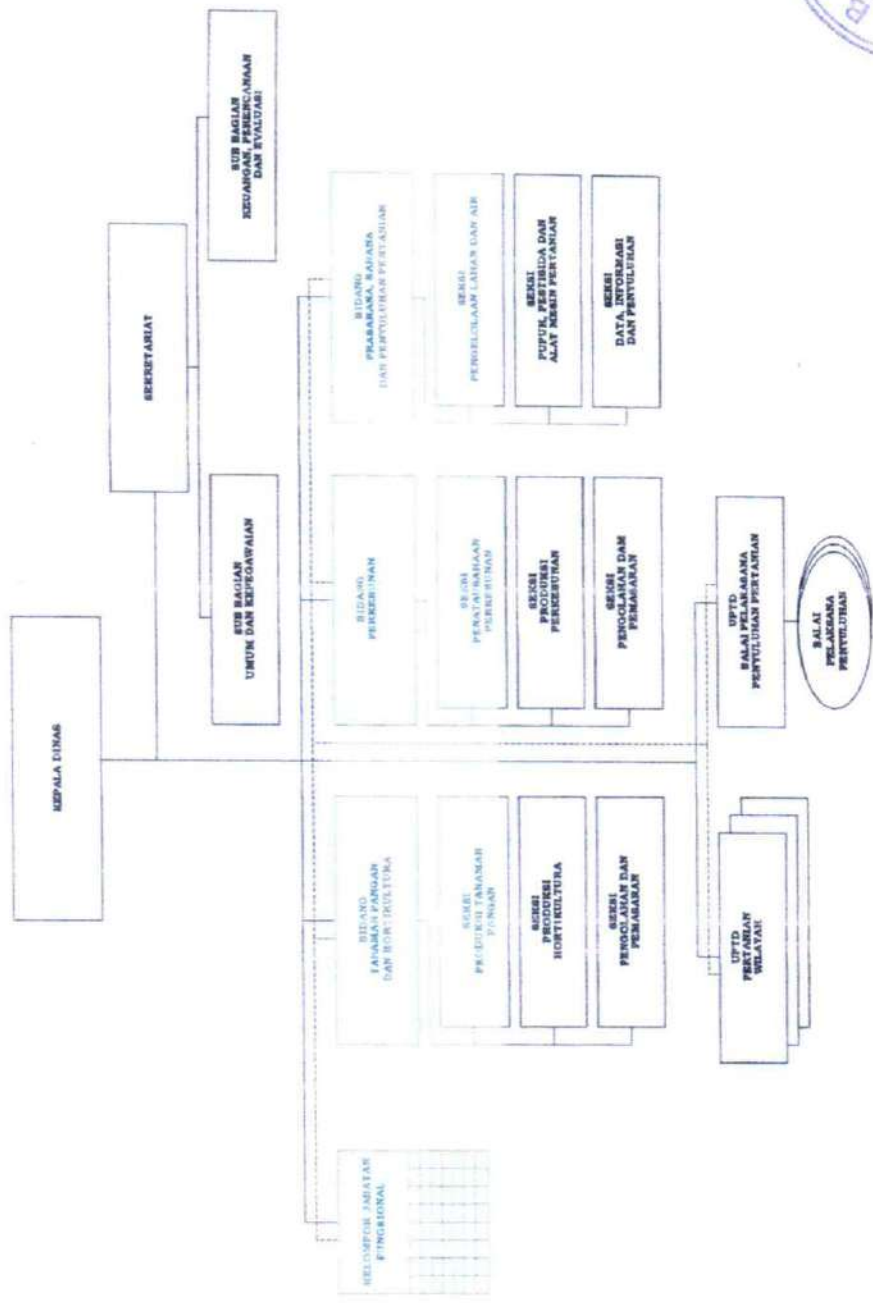
Ir. H. SUDRAJAT, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620422 198803 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUKABUMI
 NOMOR : 75 TAHUN 2018
 TANGGAL : 19 oktober 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN



—————
 GARIS KOMANDO

- - - - -
 GARIS KOORDINASI

BUPATI SUKABUMI,

 MARWAN HAMAMI

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan (x Rp .000.000,-)												Unit Kerja SKPD/ Penanggung Jawab
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas birokrasi	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis 3. Pelayanan Administrasi Aset 4. Pelayanan Administrasi Kepegawaian 5. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis UPTD Wilayah Sukabumi 6. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis UPTD Wilayah Cibadak 7. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis UPTD Wilayah Cicurug	Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran UPTD Fasilitas Pendukung Administrasi Kepegawaian Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran UPTD Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran UPTD		100%	2,000	100%	2,200	100%	3,000	100%	3,500	100%	5,070	100%	5,570	Dinas Pertanian
								12 Bulan	500	12 Bulan	700	12 Bulan	1,500	12 Bulan	2,000	12 Bulan	2,500	12 Bulan	3,000	
								12 Bulan	750	12 Bulan	750	12 Bulan	750	12 Bulan	750	12 Bulan	750	12 Bulan	750	
								12 Bulan	500	12 Bulan	500	12 Bulan	500	12 Bulan	500	12 Bulan	500	12 Bulan	500	
								12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	12 Bulan	250	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	12 Bulan	150	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	12 Bulan	130	
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	12 Bulan	130	

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan (x Rp .000.000,-)												Unit Kerja SKPD/ Penanggung Jawab
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					8. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis UPTD Wilayah Palabuhanratu	Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran UPTD		0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	170	170		
					9. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis UPTD Wilayah Jampangtengah	Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran UPTD		0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	100	100		
					10. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis UPTD Wilayah Jampangkulon	Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran UPTD		0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	170	170		
					11. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis UPTD Wilayah Sagaranten	Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran UPTD		0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	120	120		
					12. Pelayanan Administrasi Perkantoran Unit Pelayanan Teknis Balai Penyuluhan Pertanian	Fasilitas Pendukung Administrasi Perkantoran UPTD		0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	100	100		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	2,100	100%	2,350	100%	3,350	100%	4,050	100%	4,550	14,410		
					Kegiatan :															
					1. Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas Roda dua dan roda 4		10 Buah	500	10 Buah	500	10 Buah	700	10 Buah	800	10 Buah	900	1,000		
					2. Pengadaan Perangkat Komputer	Perangkat Komputer		10 Unit	200	10 Unit	200	10 Unit	200	10 Unit	200	10 Unit	200	200		
					3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Berupa Bensin/Solar dan Jasa Service		10 Unit	500	10 Unit	600	10 Unit	700	10 Unit	800	11 Unit	900	900		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan (x Rp .000.000,-)												Unit Kerja SKPD/ Penanggung Jawab
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					4. Pembangunan Pagar Kantor	Pagar Kantor		1 Unit	250	1 Unit	300	1 Unit	350	1 Unit	400	1 Unit	450	1 Unit	450	
					5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor		40 Unit	200	40 Unit	250	40 Unit	300	40 Unit	350	50 Unit	400	50 Unit	450	
					6. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		50 Jenis	200	50 Jenis	200	50 Jenis	200	50 Jenis	500	50 Jenis	600	50 Jenis	700	
					7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang terpelihara		0	0	0	0	50 Jenis	350	50 Jenis	400	50 Jenis	450	50 Jenis	450	
					8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	Terpeliharanya komputer dinas		0	0	0	0	20 Unit	200	20 Unit	200	20 Unit	200	20 Unit	200	
					9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik	Fasilitas Listrik Kantor Dinas Pertanian		12 Bulan	250	12 Bulan	300	12 Bulan	350	12 Bulan	400	12 Bulan	450	12 Bulan	450	
					10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor		50 Jenis	400	50 Jenis	500	50 Jenis	600	50 Jenis	700	50 Jenis	800	50 Jenis	800	
					11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Kantor		30 Jenis	350	30 Jenis	400	30 Jenis	450	30 Jenis	500	30 Jenis	550	30 Jenis	600	
					12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya halaman dan taman		50 Jenis	250	50 Jenis	300	50 Jenis	350	50 Jenis	400	50 Jenis	450	50 Jenis	450	
					13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor		5 Unit	400	5 Unit	500	5 Unit	600	5 Unit	700	5 Unit	800	5 Unit	800	
					14. Pemeliharaan Rutin berkala Instalasi Air	Terpeliharanya Instalasi air		12 Bulan	80	12 Bulan	100	12 Bulan	120	12 Bulan	140	12 Bulan	160	12 Bulan	160	
					15. Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan kantor		1 Unit	4,000	1 Unit	5,000	1 Unit	5,500	1 Unit	6,000	1 Unit	6,500	1 Unit	6,500	
					16. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		0	0	0	0	0	0	0	0	30 Jenis	300	30 Jenis	300	

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan (x Rp .000.000,-)												Unit Kerja SKPD/ Penanggung Jawab					
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021							
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
					Pengembangan Dam Parit/Embung			0	0	25 unit	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Jalan Pertanian					20 Km		0			0										
					Fasilitasi Komisi Pupuk dan Pestisida					1 tahun		1 tahun			1 tahun										
					Verifikasi dan Validasi Pupuk bersubsidi					47 kec		47 kec			47 kec										
					13. Optimalisasi Kebun Dinas	Pengelolaan kebun dinas		6 Lokasi	400	6 Lokasi	500	600	6 Lokasi	700	6 Lokasi	800	6 Lokasi	900							
					14. WISMP II	Pembinaan / Pelatihan P3A/GP3A		10 Di		10 Di		10 Di			10 Di										
					Dana Investasi Agribisnis(DIA)			14 kel P3A/GP3A	400	14 kel P3A/GP3A	500	500	14 kel P3A/GP3A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Legalisasi P3A/GP3A			30 Kelompok		30 Kelompok		30 Kelompok			30 Kelompok										
					15. WISMP Loan	Fasilitas Peralatan Pertanian		4 Unit	100	4 Unit	500	500	4 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					16. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	- Media Sosialisasi Penerapan Perda LP2B				5 jenis			5 jenis		5 jenis										
					- Insentif LP2B berupa benih dan pupuk					20.000 Ha		20.000 Ha		20.000 Ha		20.000 Ha		20.000 Ha		20.000 Ha		20.000 Ha			
					Insentif LP2B berupa sertifikasi dan keringanan PBB					20.000 paket	1.000	1.000	20.000 paket	1.000	20.000 paket	1.000	20.000 paket	1.000	20.000 paket	1.000	20.000 paket	1.000	20.000 paket	1.000	
					Delinasi dan Pemetaan sawah LP2B			5.000 Ha	1.600	10.000 Ha		15.000 Ha		15.000 Ha		15.000 Ha		15.000 Ha		15.000 Ha		15.000 Ha			
					17. Pengembangan Infrastruktur Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Penyuluhan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR	Irigasi Air Tanah : - Air tanah dangkal - air tanah dalam Dam Parit Jalan pertanian Embung Gudang Penyimpanan		52 unit																	
					18. DAK Reguler Bidang Pertanian	Irigasi Air Tanah : - Air tanah dangkal Dam Parit Jalan Pertanian		0	0	52 Unit	22.000	35.000	150 Unit	12.000	150 Unit	12.000	150 Unit	12.000	150 Unit	12.000	150 Unit	12.000	150 Unit	12.000	
					19. DAK Reguler Bidang Pertanian (Pendampingan)	Monitoring dan Evaluasi		0	0	47 kec	250	300	47 kec	350	47 kec	400	47 kec	450							

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan (x Rp .000.000,-)												Unit Kerja SKPD/ Penanggung Jawab																				
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021																						
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																					
20. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan					a. Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi	2.16	5,000	2.16	5,000	2.16	6,000	2.16	5,000	2.16	5,000	2.16	5,000	2.16	5,000	2.16	5,000	2.16	5,000																	
																								30 kelompok	20 Unit	10 Unit	30 kelompok	20 Unit	10 Unit	30 kelompok	20 Unit	10 Unit	30 kelompok	20 Unit	10 Unit					
																																				6.250 Ha	20 Ha	20 unit	47 kec	47 kec
21. Sarana dan Prasarana Pertanian					Rehabilitasi Jaringan Irigasi	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
																								20 Ha	20 unit	47 kec	47 kec													
																												150 Unit	50 Unit	20 unit	47 kec	47 kec								
																																	0	0	0	0				
22. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian					Rehabilitasi Jaringan Irigasi	0	10,000	250 Unit	10,000	250 Unit	10,000	250 Unit	10,000	250 Unit	10,000	250 Unit	10,000	250 Unit	10,000	250 Unit	10,000	250 Unit	10,000	250 Unit	10,000															
																										50 Unit	20 unit	47 kec	47 kec											
																														50 Unit	20 unit	47 kec	47 kec							
																																		0	0	0	0			
23. Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)					Peningkatan kapasitas sumber daya petani di 14 Daerah Irigasi (DI)	0	0	14 Daerah Irigasi (DI)	3,000	14 Daerah Irigasi (DI)	4,000	14 Daerah Irigasi (DI)	5,000	14 Daerah Irigasi (DI)	6,000	14 Daerah Irigasi (DI)	6,000	14 Daerah Irigasi (DI)	6,000	14 Daerah Irigasi (DI)	6,000	14 Daerah Irigasi (DI)	6,000	14 Daerah Irigasi (DI)	6,000															
																										0	0	0	0											
																														0	0	0	0							
																																		0	0	0	0			
24. Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)					Peningkatan kapasitas sumber daya petani di 14 Daerah Irigasi (DI)	0	0	14 Daerah Irigasi (DI)	300	14 Daerah Irigasi (DI)	350	14 Daerah Irigasi (DI)	400	14 Daerah Irigasi (DI)	450	14 Daerah Irigasi (DI)	450	14 Daerah Irigasi (DI)	450	14 Daerah Irigasi (DI)	450	14 Daerah Irigasi (DI)	450	14 Daerah Irigasi (DI)	450															
																										0	0	0	0											
																														0	0	0	0							
																																		0	0	0	0			

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan (x Rp .000.000,-)												Unit Kerja SKPD/ Penanggung Jawab
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			produksi pertanian unggul daerah			Pemasaran dan Promosi Hasil Perkebunan		5	250	5	250	5	250	5	250	5	250			
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Tani Berorientasi Agribisnis Berbasis Potensi Lokal	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)			Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)		0	0	0	0	25	5,000	25	5,000	25	5,000			
					Kegiatan :															
					1. Pengembangan Pasca Panen dan Produk Olahahan Padi, Palawija dan Hortikultura	Fasilitas Separator		10 Unit	7,500	10 Unit	8,500	10 Unit	1,500	10 Unit	1,500	10 Unit	1,500			
					Alat Pasca Panen:			5 unit	500	5 unit	500	5 unit	500	5 unit	500	5 unit	500			
					a. Combine Harvester			5 unit	1,700	5 unit	1,900	5 unit	2,000	5 unit	2,000	5 unit	2,000			
					b. Terpal			10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit				
					c. Power Thresher			15 unit	7,500	15 unit	8,500	15 unit	2,000	15 unit	2,000	15 unit	2,000			
					d. Alat Pengolahan Padi, Palawija dan Hortikultura			19 kali		19 kali		19 kali		19 kali		19 kali				
					2. Pengembangan Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian	Adanya Fasilitas Pameran dan promosi Produk Pertanian		1 lokasi	1,000	1 lokasi	1,000	2 lokasi	1,000	2 lokasi	1,000	2 lokasi	1,000			
					Outlet show window			1 kali		2 kali		3 kali		3 kali		3 kali				
					Temu kemitraan			20 kali	750	0	0	0	0	0	0	0	0			
					3. Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian	Adanya Fasilitas Pameran dan promosi Produk Pertanian														
					4. Kajian Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan	Dokumen Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan		0	0	1 dok	600	0	0	0	0	0	0			
					5. Road Map Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan	Dokumen Road Map Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan		0	0	0	500	1 dok	500	1 dok	500	1 dok	500			

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan (x Rp .000.000,-)												Unit Kerja SKPD/ Penanggung Jawab
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					6. Pengembangan dan Penguatan Permodalan Kelompok Pertanian	Adanya fasilitasi permodalan pertanian		0	0	100 poktan	800	100 poktan	800	100 poktan	800	100 poktan	800			
					7. Pengembangan Usaha dan Permodalan	Adanya fasilitasi permodalan pertanian	10 Poktan	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					8. Pengembangan Kawasan Buah-Buahan	Adanya Kawasan Produk Unggulan Pisang, Manggis, Sirsak ratu dan Durian	0	0	55 desa	2,450	55 desa	2,450	55 desa	2,450	55 desa	55 desa	2,450			
					9. Pengembangan Kawasan Sayuran	Adanya Kawasan Produk Unggulan Cabe, Tomat dan Bawang merah	0	0	54 desa	3,000	54 desa	3,000	54 desa	3,000	54 desa	54 desa	3,000			
					10. Pengembangan Kawasan Biofarmaka	Adanya Kawasan Produk Unggulan Temu Lawak dan Jahe	0	0	8 Lokasi	250	8 Lokasi	250	8 Lokasi	250	8 Lokasi	8 Lokasi	250			
					11. Pengembangan Kawasan Florikultura	- Green house pompanisasi	0	0	42 unit	2,000	42 unit	2,000	42 unit	2,000	42 unit	42 unit	2,000			
					12. Pengembangan Pisang di Wilayah Jabar Selatan	Penanaman Pisang di Wil. Sukabumi	0	0	100 Ha	1,000	100 Ha	2,000	100 Ha	3,000	100 Ha	100 Ha	4,000			
					13. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	7 Lokasi	1,100	7 Lokasi	1,100	7 Lokasi	1,100	7 Lokasi	1,100	7 Lokasi	7 Lokasi	1,100			
						b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Forikultur Berkelanjutan	8 Lokasi	3,500	8 Lokasi	3,500	8 Lokasi	3,500	8 Lokasi	3,500	8 Lokasi	8 Lokasi	3,500			
						c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan	9 Lokasi	1,100	9 Lokasi	1,100	9 Lokasi	1,100	9 Lokasi	1,100	9 Lokasi	9 Lokasi	1,100			

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan (x Rp .000.000,-)												Unit Kerja SKPD/ Penanggung Jawab
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					21. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Pembinaan dan fasilitasi kelompok/gapoktan di 386 Desa/Kelurahan	0	0	0	0	0	0	0	386 Desa/ Kel	1,000	386 Desa/ Kel	1,000	386 Desa/ Kel	1,000	
					22. Pelayanan Penyuluhan Pertanian	Penerapan Teknologi Tepat Guna di 386 Desa/Kelurahan	0	0	0	0	0	0	386 Desa/ Kel	970	386 Desa/ Kel	970	386 Desa/ Kel	970		
					23. Pengelolaan Ketenagaan Penyuluh (PKP)	Pembinaan dan pengelolaan tenaga penyuluh PNS dan Non PNS (THL Propinsi dan THL Pusat)	0	0	0	0	0	0	235 Orang	1,000	235 Orang	1,000	235 Orang	1,000		
					24. Pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes)	Pengadaan Sistem Jarkomluhdes	0	0	0	0	0	0	80 Paket	1,200	80 Paket	1,500	80 Paket	1,500		
					25. BOP Penyuluh Pertanian	Bahan Bakar Minyak (BBM)	0	0	0	0	0	0	80000 Ltr	900	80000 Ltr	1,398	80000 Ltr	1,398		
					26. Pengelolaan Tenaga Penyuluh (THL-TBPP)	Honorarium / Insentif THL-TBPP dan BOP	0	0	0	0	0	0	60 Orang	1,440	60 Orang	1,440	60 Orang	1,440		
					Program Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan	68,853	5,145	69,943	5,645	71,033	6,695	72,123	6,709	73,213	6,945	74,284	7,095		
			Jumlah Produksi Pertanian Non Pangan			Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)	53,219	4,575	53,854	4,575	54,489	4,575	55,124	4,575	55,759	4,575	56,378	4,575		
			Jumlah Produksi Pertanian Non Pangan			Jumlah Produksi Perkebunan Besar (Ton)	15,634	170	16,089	170	16,544	340	16,999	170	17,454	170	17,906	170		
					Kegiatan :															
					1. Intensifikasi Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan (Ton) :															
					- Karet	IPR Karet	1,134	1,000	1,148	1,000	1,162	1,000	1,176	1,000	1,190	1,000	1,204	1,000		
					- Teh	IPR Teh	2,043	1,000	2,058	1,000	2,073	1,000	2,088	1,000	2,103	1,000	2,118	1,000		
					- Kelapa	IPR Kelapa	45,450	1,250	45,900	1,250	46,350	1,250	46,800	1,250	47,250	1,250	47,700	1,250		

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan (x Rp.000.000,-)												Unit Kerja SKPD/ Penanggung Jawab
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		- Cengkeh				IPR Cengkeh		1,221	500	1,251	500	1,281	500	1,311	500	1,341	500	1,371	500	
		- Kopi				IPR Kopi		116	100	122	100	128	100	134	100	140	100	140	100	
		- Aren				IPR Aren		2,863	100	2,943	100	3,023	100	3,103	100	3,183	100	3,263	100	
		- Pala				IPR Pala		332	500	362	500	392	500	422	500	452	500	482	500	
		- Kakao				IPR Kakao		60	125	70	125	80	125	90	125	100	125	100	125	
		2. Pembinaan dan Pengawasan Perkebunan Besar (Ton):																		
		- Karet				Produksi Karet		6,645	50	6,839	50	7,033	100	7,227	50	7,421	50	7,615	50	
		- Teh				Produksi Teh		4,235	50	4,358	50	4,481	100	4,604	50	4,727	50	4,850	50	
		- Kakao				Produksi Kakao		118	20	121	20	124	40	127	20	130	20	133	20	
		- Kelapa Sawit				Produksi Kelapa Sawit		4,528	30	4,660	30	4,792	60	4,924	30	5,056	30	5,188	30	
		- Cengkeh				Produksi Cengkeh		108	20	111	20	114	40	117	20	120	20	120	20	
		3. Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan				Benih tanaman perkebunan		1	200	2	250	1	1,000	1	1,100	1	1,200	1	1,300	
		4. Perlindungan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan				Pengendalian OPT Perkebunan		0	0	5	150	5	165	5	182	5	200	5	200	
		5. Pengendalian Gangguan Usaha dan Kebakaran pada Perkebunan				Pengendalian Gangguan Usaha dan Kebakaran		0	0	5	150	5	165	5	182	5	200	5	200	
		6. Pengolahan Data Statistik Perkebunan				Data Statistik Perkebunan		2	200	2	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7. Pengolahan Data Statistik Pertanian				Data Statistik Pertanian		0	0	0	0	12	450	12	500	12	600	12	650	
		JUMLAH						145,855		265,575		310,296		282,752		300,279		324,784		

Sukabumi, Januari 2019
Kepala Dinas Pertanian



